

KERJA SAMA JEPANG DAN FILIPINA DALAM BIDANG TENAGA KERJA SEBAGAI INDIKATOR PEMBANGUNAN

Denada Faraswacyen L. Gaol, M.Si.

**Dosen pada Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur
Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta, 12260
df.lgaol@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama Jepang dan Filipina dalam bidang tenaga kerja sebagai indikator pembangunan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan produktivitas perekonomian akibat merosotnya jumlah penduduk Jepang dalam sepuluh tahun terakhir. Sedangkan Filipina menghadapi masalah pengangguran dan jumlah penduduk usia kerja yang sangat besar akibat bonus demografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Hasil penelitian adalah Pemerintah Jepang dan Filipina menjalin kerja sama bilateral tingkat kolaborasi dalam bidang tenaga kerja. Jepang menerima pekerja migran Filipina (*Overseas Filipino Workers/OFW*) berdasarkan pertimbangan kompetensi *OFW* yang mampu menopang industri manufaktur dan jasa melalui tingkat pengetahuan dan keahlian, sertifikasi keahlian, kesadaran hukum akan hak dan kewajiban sebagai pekerja migran, pengetahuan bahasa asing, latar belakang historis, dan kedekatan geografis. Filipina memiliki *Philippines Overseas Employment Administration (POEA)* yang membuat program pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja, memiliki UU Tenaga Kerja Migran yang disebut *Republic Act* yang berisi pemerintah wajib menyediakan 100 juta peso untuk bantuan hukum/membayar pengacara. *Republic Act* juga mengamankan pembuatan *Resource Centre* di negara yang banyak tenaga kerja Filipina. Upaya serius Pemerintah Filipina menghasilkan remitansi dari *OFW* sebesar 10% dari total devisa dan mampu menopang pembangunan ekonomi dan sosial.

Kata kunci: kerja sama bilateral, tenaga kerja, pembangunan

1. Pendahuluan

Dalam melaksanakan pembangunan suatu negara, salah satu factor yang harus diperhatikan adalah sumber daya manusia (SDM). Ketersediaan SDM menjadi modal utama yang akan digunakan sebagai tenaga kerja atau sumber usia produktif sebagai penggerak pembangunan. Hal ini menjadi masalah sangat serius

yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Jepang saat ini. Fenomena penurunan jumlah penduduk yang beberapa tahun terakhir ini terus-menerus terjadi menyebabkan penurunan tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita Jepang⁹. Angka kelahiran di Jepang merosot pada 2014, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan dengan hanya 1.001.000 bayi lahir pada 2014 atau lebih rendah 9.000 dibandingkan 2013. Penurunan ini adalah yang keempat kalinya dalam empat tahun dan terjadi di tengah meningkatnya angka kematian. Sejumlah pihak mengatakan bahwa pada 2050 populasi Jepang hanya akan mencapai 97 juta atau 30 juta lebih sedikit dari sekarang. Dampak penurunan angka kelahiran ini akan merugikan Jepang dalam banyak aspek terutama dalam aspek ekonomi.

Banyak di antara warga Jepang yang memilih tidak memiliki anak sehingga jumlah populasi Jepang merosot tajam, sedangkan lebih dari satu orang di antara empat orang warga Jepang kini berusia 65 tahun atau lebih¹⁰. Jumlah warga Jepang yang berusia 65 tahun atau lebih meningkat dari 1,1 juta menjadi 33 juta. Jumlah warga yang lanjut usia sekarang melebihi jumlah mereka yang berusia 14 tahun atau lebih muda dengan perbandingan 2 : 1. Pergeseran demografis tersebut merupakan kombinasi dari angka kelahiran yang rendah dan usia harapan hidup warga Jepang yang panjang. Populasi Jepang yang makin lanjut usia ini menimbulkan persoalan bagi Pemerintah Jepang atau para pembuat kebijakan yang dihadapkan pada tantangan menyusutnya warga Jepang usia produktif, sedangkan jumlah pensiunan terus meningkat.

Under the medium variant of the demographic projections issued in 2006 by the National Institute of Population and Social Security Research in Japan, the Japanese Population is set to fall more than 30 million by

⁹ http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/01/150102_majalah_jepang_kelahiran, diakses 10 Oktober 2016 pukul 14.25WIB

¹⁰ <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/01/laju-penurunan-jumlah-penduduk-jepang-capai-rekor> diakses 10 Oktober 2016 pukul 15.25WIB

2050. *Rapid population ageing will also occur due to increasing life expectancy – already the world's longest – as lowest low fertility 1.3 children per woman on average in 2006.*¹¹.

Secara umum, masalah utama yang dihadapi Pemerintah Jepang saat ini yaitu: penurunan penerimaan sector pajak, penurunan daya beli konsumen, penurunan tabungan domestic, dan peningkatan pengeluaran untuk tunjangan social bagi penduduk usia lanjut. Secara tidak langsung, masalah ini sudah berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan investasi sektor swasta di Jepang.

Population and Labor Force Projection: 2005 – 2025

	2005	2010	2015	2020	2025
Total population (millions)	127.5	127.4	126.2	124.1	121.2
Working-age population (15 and older in millions)	109.7	109.8	109.5	108.7	107.6
Total employment millions ^a	63.7	61.8	58.7	56.7	55.6
Employment ratio (%) ^b	50.0	48.5	46.5	45.7	45.9
Percentage point increase in age-specific employment rates needed to maintain the employment ratio at 50.0		4.7	9.1	12.2	13.3

^a Assumes age-specific employment rates remain constant over time

^b Employment ratio is the number of people employed divided by the total population

Sumber: *Population Decline, Labor Force Stability and the Future of the Japanese Economy*, Robert L. Clark et al, *Eur J Population* (2010) 26: 207 – 227

Beberapa solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang dikategorikan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk solusi jangka panjang, pemerintah mulai mengupayakan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi warganya yang memiliki anak serta menjanjikan insentif atau kemudahan-kemudahan lainnya. Solusi jangka panjang tersebut membutuhkan proses yang cukup lama di tengah tuntutan pembangunan yang terus berlangsung. Solusi jangka pendek yang tengah ditempuh oleh Pemerintah Jepang adalah

¹¹ Veron, Jacques. (2008). *Prospects of Population Decline in Japan*. Population and Societies October 2008; 449; Agricultural and Environmental Science Database.

mendatangkan tenaga kerja migran dari Filipina. Hal ini dilakukan atas beberapa pertimbangan, yaitu: Filipina sebagai pemasok tenaga kerja berkualitas dalam hal penguasaan bahasa asing dan teknologi, secara geografis letak Filipina tidak terlalu jauh dari Jepang.

Filipina merupakan negara pemasok terbesar untuk tenaga kerja di wilayah Asia. Kontribusi para tenaga kerja migran terhadap devisa mencapai miliaran dollar dalam setahun. Jumlah kontribusi dari pekerja migran didukung oleh kebijakan Pemerintah Filipina yang focus pada pengelolaan tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri, *“Therefore, in countries such as Philippines, the government initiates, supports and facilities large-scale labor-migration in order to ensure inflow of foreign currency to the country, to alleviate trade deficits and to combat problems associated with domestic unemployment”*¹².

Tenaga kerja migran Filipina menghasilkan devisa sebesar 28 miliar dolar AS per tahun. Hal ini menunjukkan motor perekonomian Filipina berasal dari tenaga kerja. Meski devisa tenaga kerja Filipina paling besar di seluruh ASEAN, namun hal itu tidak membuat Pemerintah Filipina berhenti mengirimkan tenaga kerjanya. Setiap tahun kualitas tenaga kerja Filipina terus membaik dengan adanya spesifikasi profesi di lapangan kerja¹³. Tenaga kerja Filipina memiliki kualitas di bidang penguasaan bahasa asing, kemampuan teknologi informasi (IT), dan manajemen. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemerintah Jepang melakukan strategi yaitu menerima tenaga kerja dari Filipina.

Through the Philippines Overseas Employment Administration (POEA), the Philippines developed the institutional framework to facilitate the

¹² Semyonov, Moshe and Anastasia Gorodzeisky. (2008). *Labor Migration, Remittances and Economic well-being of Households in the Philippines*. Popul Res Policy Rev (2008) 27: 619 – 637.

¹³ <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/16/tenaga-kerja-filipina-lebih-banyak-sumbang-devisa-dibanding-tni> diakses 12 Oktober 2016 pukul 13.25WIB

*placement and processing of workers who desire employment abroad. POEA connects to the world and in partnership with all stakeholders, facilitates the generation and preservation of decent jobs for Filipino migrant workers, promotes their protection and advocates their smooth reintegration into Philippine society*¹⁴.

Filipina disebut sebagai salah satu negara pengekspor tenaga kerja terbesar di dunia, dengan jumlah berkisar antara 10 – 12 juta orang (+/- 10% dari total penduduk). Saat ini, tenaga kerja Filipina (*Overseas Filipino Workers/OFW*) menjadi bagian amat penting bagi masyarakat dan ekonomi negara Jepang. Berdasarkan fakta tersebut maka Jepang lebih memilih mendatangkan tenaga kerja Filipina karena sudah tersertifikasi dan dapat menghemat pengeluaran pemerintah terkait biaya pelatihan tenaga kerja asing¹⁵.

2. Tinjauan Pustaka

Kerja sama Internasional

Perkembangan situasi hubungan internasional ditandai dengan adanya berbagai kerja sama internasional dikarenakan secara umum negara-negara memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mencapai tujuannya, sehingga solusi yang dipilih dan dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan negara yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

“Kerja sama merupakan suatu usaha antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Terjadinya kerja sama dilandasi oleh adanya kepentingan yang sama dimana landasan tersebut menjadi pijakan untuk memecahkan berbagai permasalahan secara bersama-sama melalui suatu mekanisme kerja sama. Dalam melakukan suatu kerja sama harus ada iklim yang menyenangkan dalam pembagian tugas serta balas jasa yang akan dibawa¹⁶”.

¹⁴ Wiley, James E. (2012). *Exporting People: A Filipino Development Model. Focus on Geography*. Spring 2012, 55; 1 ProQuest, page 19

¹⁵ <http://www.bmj.com/cgi/content/full/320/7246/1362/h> JoeLamar. 2012. ShortageofNursesJapanLeadstoHighAccidentRate.diakses 12 Oktober 2016 pukul 09.25WIB

¹⁶ Soerjono, Soekanto. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali.

Selain itu, Soerdjono Soekanto mengenai kerja sama:

“Suatu kerja sama akan bertambah kuat apabila ada bahaya dari luar yang menyinggung kesetiaan yang secara tradisional atau institusional telah tertanam di dalam kelompok, dalam diri seseorang atau segolongan orang¹⁷”

Dalam kajian hubungan internasional beberapa waktu terakhir ini kerja sama internasional merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum internasional.

“Kerja sama Internasional terjadi karena ‘*nation understanding*’ di mana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan kerja sama itu didasari oleh kepentingan bersama di antara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik¹⁸”

Kerja sama internasional dilaksanakan guna meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Kerja sama internasional pada hakekatnya dapat dibedakan dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kerja Sama Multilateral
Hakekat dan kerja sama internasional yang universal (global) adalah memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama dan menghindari konflik internasional.
2. Kerja Sama Regional
Merupakan kerja sama antarnegara yang berdekatan secara geografis, kerja sama jenis ini merupakan gagasan yang mulai dikenal pada awal abad ke-19.
3. Kerja Sama Fungsional
Dalam kerja sama fungsional, negara-negara terlibat masing-masing diasumsikan mendukung fungsi tertentu, sehingga kerja sama tersebut akan melengkapi berbagai kekurangan pada setiap negara.
4. Kerja Sama Ideologi
Kerja sama ini merupakan alat dari suatu kelompok kepentingan untuk membenarkan tujuan dari perjuangan kekuasaannya.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Kartasmita, Koesnadi. (1998). *Organisasi dan Administrasi Internasional*. Bandung: PT Angkasa

Ada tiga motif dalam melakukan suatu kerja sama internasional, yaitu ¹⁹:

1. Meningkatkan kepentingan nasional
2. Memelihara perdamaian
3. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi

Terdapat tiga tingkatan kerja sama internasional, yaitu²⁰:

1. Konsensus, merupakan suatu tingkat kerja sama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan di antara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi di antara negara-negara yang terlibat.
2. Kolaborasi, merupakan suatu tingkat kerja sama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerja sama yang aktif di antara negara-negara yang terjalin hubungan kerja sama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.
3. Integrasi, merupakan kerja sama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi di antara negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali terjadinya benturan kepentingan di antara negara-negara yang terlibat.

Lingkup aktivitas yang dilaksanakan melalui kerja sama internasional antarnegara meliputi berbagai kerja sama multidimensi, seperti kerja sama ekonomi, kerja sama dalam bidang sosial, dan kerja sama dalam bidang politik.

Tenaga Kerja

Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu: modal, tenaga kerja dan teknologi²¹. Semakin besar angkatan kerja, yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi maka semakin besar pula pendapatan nasional dan

¹⁹ Toma, Peter A. Dan Gorman, Robert F. (1991). *International Relations: Understanding Global Issues*. California: Brooks/Cole Publishing Co.

²⁰ Smith dan Hocking, 1990 dalam [http://luthfiana12unairacid-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-58910-PIHI-ILMU%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL%20SEBUAH%20PENGANTAR%20\(%20Peningkatan%20Hubungan%20Internasional,%20Essensi%20Interaksi%20Internasional,%20Power,%20Actors%20dan%20Interests\).html](http://luthfiana12unairacid-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-58910-PIHI-ILMU%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL%20SEBUAH%20PENGANTAR%20(%20Peningkatan%20Hubungan%20Internasional,%20Essensi%20Interaksi%20Internasional,%20Power,%20Actors%20dan%20Interests).html)

²¹ Sukirno, Sadono (2001). *Makro Ekonomi ed.2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi²². Input tenaga kerja terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja²³. Banyak ekonom percaya bahwa kualitas input tenaga kerja yakni keterampilan, pengetahuan dan disiplin tenaga kerja merupakan elemen paling penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Setiap perusahaan dalam melaksanakan proses produksi tidak dapat hanya mengandalkan pemanfaatan fasilitas dengan teknologi modern, karena sistem produksi membutuhkan jasa tenaga kerja untuk memperlancar proses produksi yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam proses produksi untuk menghasilkan barang maupun jasa di samping faktor produksi modal, teknologi dan sumber daya alam. *“Production/operation cannot function without people. The human resources function is to recruitment train workers to fill production process according to the job design and skill assessment performed by work-study analysts”*²⁴.

Tenaga kerja dibutuhkan untuk melakukan transformasi dari bahan mentah menjadi barang jadi yang dikehendaki oleh perusahaan. Tenaga kerja adalah orang yang melaksanakan dan menggerakkan segala kegiatan, menggunakan peralatan dengan teknologi dalam menghasilkan barang dan jasa yang bernilai ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penggunaan tenaga kerja sebagai variabel dalam proses produksi lebih ditentukan oleh pasar tenaga kerja, dalam hal ini dipengaruhi oleh upah tenaga kerja serta harga *output*-nya²⁵. Tenaga kerja adalah usaha-usaha manusia diarahkan pada penciptaan barang dan jasa. Tenaga kerja dalam tugasnya termotivasi dan akan berproduksi lebih giat lagi bila diberi

²² Todaro, Michael P. (2006). *Pembangunan Ekonomi. Jilid 1 edisi 9*. Jakarta: Erlangga.

²³ Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. (2001). *Macroeconomics. Seventeenth Edition*. McGraw-Hill Higher Education.

²⁴ Ruch, William. A, Fearon and Witers. (1992). *Fundamental of Production and Operation Management*. United State of America: West Publising Company. St. Paul.

²⁵ Gitosudarmo, Indriyo. (2003). *Pengantar Bisnis Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.

imbalan atau diberi upah yang memadai. Selain itu perusahaan perlu memperhatikan kepuasan tenaga kerja dengan memberikan penghargaan, tunjangan sehingga mereka terpacu untuk meningkatkan produktivitas.

3. Metodologi Penelitian

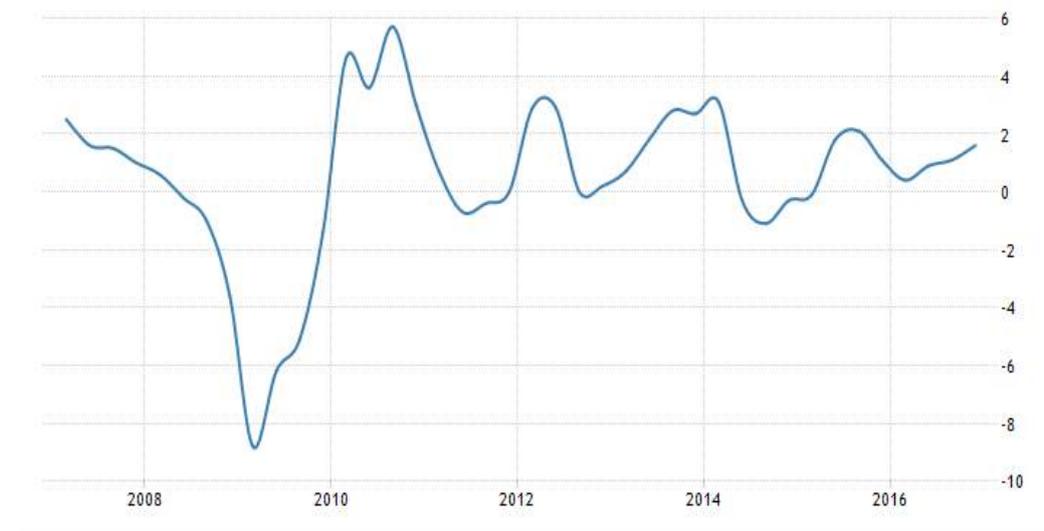
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna di balik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka bersumber dari buku-buku tentang teori dan konsep kerja sama dan pembangunan, jurnal-jurnal ilmiah yang berisi publikasi kerja sama Jepang dan Filipina, media massa yang memuat informasi terkait Jepang dan Filipina, situs resmi terkait, dan lain-lain.

4. Analisis Penelitian

Berdasarkan kondisi yang dialami oleh Jepang dan Filipina dan telah dipaparkan sebelumnya, maka Pemerintah Jepang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Filipina untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja sedangkan di sisi lain, Filipina juga memiliki kepentingan yang sama yaitu menyalurkan tenaga kerja yang cukup banyak tersedia akibat keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja bagi warganya terutama usia produktif. Oleh karena itu Jepang dan Filipina melakukan kerja sama bilateral dalam bidang tenaga kerja yang dimaksudkan untuk dapat saling merealisasikan kepentingan nasional kedua negara. Melalui kerja sama bilateral tersebut

diharapkan Jepang dapat memperbaiki produktivitas ekonominya yang sempat menurun akibat masalah demografi.

Pertumbuhan ekonomi Jepang dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Hal ini dapat dilihat dari PDB yang beberapa kali berada pada angka minus, seperti pada tahun 2009, 2011, dan akhir 2014. PDB Jepang yang meliputi sector pertanian, konstruksi, manufaktur, pertambangan, administrasi public, jasa, transportasi, dan utilitas dalam sepuluh tahun terakhir sangat rentan terhadap guncangan. Produktivitas perekonomian dari sector-sector PDB tersebut dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sumber daya alam, perkembangan teknologi, budaya, dan sumber daya modal.



Gambar 4.1 PDB Jepang Periode 2008 – 2017 (*ongoing*)

Kondisi riil yang sedang dihadapi oleh Jepang berkaitan dengan penurunan produktivitas ekonomi adalah disebabkan oleh sumber daya manusia. Aspek ini merupakan factor penentu yang terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara termasuk Jepang. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung. Kualitas sumber daya

manusia bergantung pada keahlian, kreativitas, pelatihan, dan pendidikan. Jika sumber daya manusia memiliki keahlian memadai dan terlatih maka output akan berkualitas tinggi. Di sisi lain, langkanya tenaga tenaga kerja ahli akan menghambat pertumbuhan ekonomi yaitu bahwa jumlah tenaga kerja berlebihan tidak akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sumber daya manusia suatu negara harus mencukupi angka kebutuhan tenaga kerja ahli yang dibutuhkan untuk dapat meraih pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

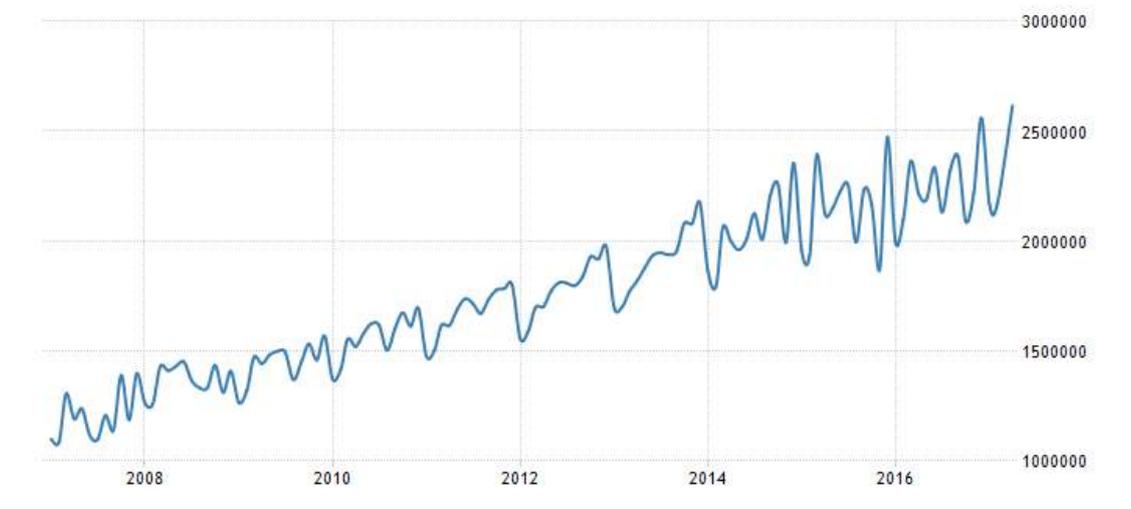
Lapangan kerja di Jepang yang belum menunjukkan pemulihan berkelanjutan terpengaruh oleh gempa bumi dan tsunami yang terjadi di bulan Maret. Lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan kecil turun sebesar 2.8% di tahun 2010 sedangkan berdasarkan survey *Tankan* oleh *Bank of Japan* di bulan Desember mayoritas usaha kecil melaporkan ketatnya posisi keuangan dan kondisi pinjaman yang sulit, menyoroti kebutuhan akan perhatian yang lebih besar



bagi usaha kecil dan menengah.

Gambar 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jepang Periode 2008 – 2017 (ongoing)

Dalam jangka pendek Jepang mendapat pasokan tenaga kerja produktif dalam bidang manufaktur dan jasa dari Filipina. Sedangkan Filipina di tengah keterbatasan lapangan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi mampu mencari solusi bagi tenaga kerjanya dengan upaya menyalurkan ke negara yang membutuhkan dan sesuai dengan syarat atau kualifikasi yang dibutuhkan seperti di Jepang. Pemerintah Filipina menyadari keterbatasannya dalam menyediakan lapangan kerja bagi warganya. Kondisi politik, ekonomi, dan social yang kurang stabil beberapa tahun terakhir berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi Filipina. Berlanjut pada jumlah penduduk yang besar dan angka pengangguran yang tinggi semakin menambah beban pemerintah dan banyak menimbulkan masalah social seperti kemiskinan dan permukiman kumuh yang bermunculan bahkan di ibukota negara yaitu Manila.



Gambar 4.3 Remitansi Filipina Periode 2007 – 2017

Salah satu upaya Pemerintah Filipina dalam bidang tenaga kerja adalah membuat program penyaluran tenaga kerja terlatih dan professional ke negara-negara yang membutuhkan seperti Jepang dan Korea. Melalui instansi pemerintah

yang menangani tenaga kerja yaitu *Philippines Overseas Employment Administration (POEA)* membuat program pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja yang akan disalurkan ke luar negeri. Bentuk pendidikan yang diberikan berupa pengetahuan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan Mandarin, pengetahuan akan hak dan kewajiban sebagai pekerja migran yang legal di negara tujuan. Sedangkan bentuk pelatihan seperti melatih penggunaan peralatan pendukung tugas sehari-hari misalnya peralatan rumah tangga bagi pekerjaan asisten rumah tangga, melakukan sertifikasi bagi pekerja medis sesuai keahlian yang dimiliki.

Sejak 2007 hingga 2017 (tahun berjalan) tingkat remitansi Filipina selalu bergerak naik secara positif atau mengalami peningkatan yang konsisten. Remitansi ini didukung kuat dari kontribusi pekerja migran (*Overseas Filipino Workers*) yang menyumbang devisa mencapai sepuluh persen dari total devisa negara. Perkembangan positif ini merupakan hasil dari upaya Pemerintah Filipina yang secara serius dan fokus menangani para *OFW* mulai tahap awal seperti pendidikan dan pelatihan, aturan yang tegas bagi legalitas para *OFW* dan industry yang mempekerjakan, kesadaran hukum (hak dan kewajiban) para *OFW*, dan pendampingan dan perlindungan para *OFW* di negara tempat bekerja. Keseriusan Pemerintah Filipina ini secara langsung mampu mendongkrak penerimaan devisa luar negeri melalui remitansi para *OFW* atau dapat dikatakan sumber devisa terbesar Filipina adalah berasal dari kontribusi para *OFW*.

Pemerintah Filipina juga membuka kantor perwakilan di setiap negara tempat tujuan para pekerja migran berada. Pembukaan kantor perwakilan ini dimaksudkan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan bagi tenaga kerja Filipina selama bekerja di negara yang bersangkutan, seperti Jepang. Di

antara negara pengirim tenaga kerja migran, Filipina adalah suatu negara yang mempunyai sistem pengelolaan tenaga kerja migran yang baik. Pengelolaan migrasi tenaga kerja di luar negeri, mulai dilakukan pemerintah pada pertengahan 1970, yang mana saat itu harga minyak sedang naik, sehingga permintaan tenaga kerja sangat besar di negara timur tengah, dan ini dilihat Presiden Marcos (ketika itu), kesempatan untuk mengurangi tekanan pengangguran penduduk di negaranya.

Pemerintah Filipina membentuk badan pengelola penempatan tenaga kerja di luar negeri yang disebut *Philippines Our Seas Employment Agency (POEA)*. *POEA* ini berada di bawah departemen tenaga kerja. *POEA* bertugas untuk memonitor perekonomian dan pasar kerja di luar negeri, dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja migran yang bekerja di luar negeri. Selain *POEA*, pemerintah juga mengizinkan agar swasta untuk melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri, agar swasta dilarang mengenakan tarif melebihi satu kali gaji. Penempatan tenaga kerja di luar negeri di dalam bahan rencana pembangunan ekonomi nasional (*National Economic Plan*) disebutkan bahwa penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan “*legitimate option for the country’s workforce*”.

Untuk menghargai jerih payah pajak tenaga kerja migran, pemerintah menetapkan hari buruh migran dan memberikan penghargaan disebut “*Bayong Bayani*” (pahlawan di era modern) pada tenaga kerja migran yang berprestasi, sikap moral yang baik keuletan dalam bekerja dan memiliki *track record* dalam menyumbang devisa bagi negara tak ketinggalan pemberian penghargaan pada majikan (*International Employer Award*) yang ikut berkontribusi dalam

meningkatkan kesejahteraan pekerja Filipina. Pemerintah memiliki komitmen yang besar dalam melindungi warga negara.

Untuk melindungi tenaga kerja migran di luar negeri, pemerintah mengharuskan melalui jalan legal, baik melalui *POEA* atau agen swasta asing, dan Pemerintah Filipina langsung bertanggung jawab sepenuhnya seperti dituntut dalam UU Tenaga Kerja Migran yang disebut *Republic Act*. Dalam *Republic Act*, pemerintah wajib menyediakan 100 juta peso, untuk bantuan hukum/membayar pengacara. *Republic Act* juga mengamankan pembuatan *Resource Centre* di negeri yang banyak tenaga kerja Filipina.

Resource Centre berada di bawah duta besar Filipina tugas nonstop 24 jam, 7 hari/minggu. Fungsi *resource centre* yaitu: (1) melakukan *counseling* dan bantuan hukum, (2) memberi bantuan pengobatan dan rumah sakit, (3) menyediakan informasi dan advokasi program mereka yang baru datang dari Filipina agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat, (4) menyediakan pelatihan dan tingkat SDM (5) memberi program sensitif gender dan berbagai kegiatan untuk membantu pekerjaan wanita.

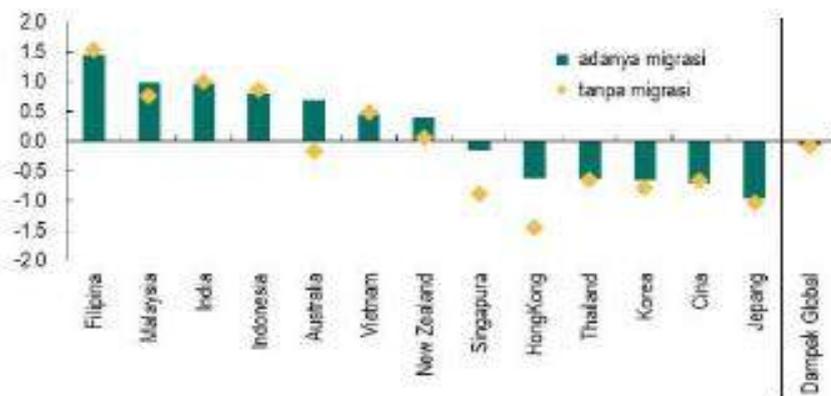
Dengan mengikuti jalan legal, calon tenaga kerja akan dapat subsidi manfaat: (1) pelatihan dan orientasi budaya di tempat baru, (2) asuransi jiwa/jaminan pensiun, (3) asuransi kesehatan, (4) berhak atas dana darurat. Untuk ini tenaga kerja migran dikenakan biaya 200 dolar per tahun (2008). Ini dilakukan oleh *Overseas Workers Welfare Administration (OWWA)*. Tenaga kerja migran dapat semacam kartu (untuk memudahkan urusan administrasi, dan kartu individu mendapatkan secara gratis). Fungsi kartu itu antara lain (1) pemegang kartu itu sebagai bukti diri bahwa dia pekerja migran Filipina yang sah, (2) nomor kartu mempunyai *link* informasi penting baik ke badan-badan pemerintah maupun

swasta, (3) sebagai bukti untuk mendapat dan layanan dari *OWWA*, (4) digunakan untuk mengirim uang ke rumah sebagai *ATM* dan kartu debit. Dengan adanya kartu ini pemerintah lebih mudah mengontrol pemasukan devisa²⁶.

Ketika Saya Berumur 64 Tahun

Dampak penuaan dapat mengurangi tingkat pertumbuhan rata-rata untuk beberapa negara Asia seperti di Korea dan Thailand, namun di negara lain, seperti Filipina, demografi yang lebih muda bermanfaat bagi perekonomian. Dampak keseluruhan pada pertumbuhan global diperkirakan kecil.

(Persentase rata-rata yang berdampak pada pertumbuhan PDB riil, periode tahun 2020-50)



Gambar 4.4 Ilustrasi Demografi di Asia

Untuk menangani perubahan demografi di Asia, para pembuat kebijakan tidak dapat memakai satu strategi yang sama. Di beberapa negara, di Jepang contohnya, populasi menua dengan cepat, sementara angkatan kerja menyusut. Di negara lain seperti Filipina, anak-anak muda yang mencari pekerjaan membanjiri pasar lapangan kerja. Seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.4 dampak penuaan penduduk berpotensi menurunkan laju pertumbuhan PDB tahunan Jepang sebesar satu persen dalam tiga dekade mendatang. Sedangkan di India dan Filipina, yang

²⁶ <https://buruhmigran.or.id/2010/09/27/soal-tki-belajar-dari-pengalaman-filipina/>

populasinya termasuk termuda di kawasan, pertumbuhan angkatan kerja dapat meningkatkan laju PDB dengan persentase yang sama. Dari Gambar 4.4 ilustrasi demografi di Asia dalam beberapa tahun ke depan, dapat dilihat bahwa yang paling merasakan dampak penurunan jumlah penduduk produktif adalah Jepang, China, dan Korea. Secara keseluruhan, bonus demografi di Asia akan berakhir. Padahal bonus demografi, yang berasal dari angkatan kerja muda (usia 15 – 64 tahun), telah membantu mendorong pertumbuhan pesat ekonomi kawasan beberapa dekade terakhir. Tingkat kesuburan kian menurun dan usia penduduk makin panjang. Banyak negara, khususnya di Asia Timur, akan mengalami penuaan tercepat di dunia dalam beberapa dekade mendatang. Pertumbuhan penduduk di Jepang sudah negatif, sedangkan pertumbuhan penduduk secara keseluruhan di Asia makin melambat dan diprediksi pertumbuhannya menjadi nol persen pada tahun 2050. Lebih dari sepertiga populasi Singapura dan Korea Selatan berusia minimal 50 tahun; di Jepang proporsinya hampir separuh populasi. Seiring penuaan, jumlah tenaga kerja akan berkurang. Angkatan kerja di Asia diproyeksi akan menyusut sebanyak ratusan juta orang. Contohnya, angkatan kerja China diperkirakan mengalami pengurangan 170 juta orang dalam tiga dekade mendatang.

Semakin lama, penyusutan angkatan kerja dan penuaan penduduk dapat memicu kenaikan biaya perawatan kesehatan dan pengeluaran pensiun. Kondisi ini membebani anggaran pemerintah, dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi kalau negara tidak punya kebijakan yang mendukung produktivitas dan pekerjaan yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, negara Asia lain seperti India dan Indonesia akan diuntungkan dari bonus demografi karena angkatan kerjanya berkembang dan tingkat kesuburannya lebih tinggi. Peran kebijakan akan menjadi

penting karena tren demografi ini menentukan masa depan perekonomian. Reformasi pasar lapangan kerja penting bagi negara yang mengalami penuaan. Migrasi dengan cara mendorong tenaga kerja asing dan program pekerja tamu juga dapat mengurangi dampak buruk penuaan dengan mengimbangi dampak penurunan angkatan kerja domestik. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja wanita, misalnya dengan pengembangan fasilitas perawatan anak dan orang tua di negara-negara seperti Jepang, dan mempromosikan pekerjaan yang fleksibel juga dapat membantu meminimalisir kurangnya pasokan tenaga kerja dan mengurangi imbas penuaan bagi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka kerja sama yang dijalin oleh Jepang dan Filipina berdampak luas pada banyak sector karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara dan kehidupan social berjalan dengan seimbang seiring dengan peningkatan taraf hidup melalui kenaikan pendapatan perkapita terutama bagi kehidupan social di Filipina. Aktivitas industry di Jepang juga berlangsung secara normal dengan lancarnya pasokan tenaga kerja dari Filipina. Tujuan Pemerintah Jepang dan Filipina dalam menjalankan fungsi pembangunan (*developing function*) bagi negaranya dapat diwujudkan melalui kerja sama tersebut.

Kesimpulan

Kerja sama Jepang dan Filipina dalam bidang tenaga kerja sebagai indicator pembangunan dilakukan oleh kedua negara berdasarkan kondisi yang sangat bertolak belakang dalam hal ketersediaan tenaga kerja. Jepang mengalami penurunan penduduk secara konsisten sejak 2004 dan berdampak pada berkurangnya penduduk usia produktif atau usia tenaga kerja. Hal ini terus berlanjut dan berdampak jangka panjang pada masalah penurunan produktivitas

perekonomian yang dialami oleh Jepang. Di sisi lain usia harapan hidup masyarakat Jepang semakin panjang dan secara tidak langsung menambah beban pemerintah dalam pembiayaan tunjangan social.

Untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja usia produktif, Pemerintah Jepang melakukan upaya strategis melalui dua acara yang dibagi dalam upaya jangka pendek dan jangka panjang. Upaya jangka pendek yaitu mendatangkan tenaga kerja usia produktif dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sector industry manufaktur dan jasa. Upaya jangka panjangnya yaitu mendorong masyarakat Jepang yang sudah berkeluarga untuk segera memiliki anak, dengan cara memberikan stimulus keringanan pajak, penyediaan fasilitas-fasilitas khusus di tempat kerja bagi perempuan pekerja yang memiliki anak, dan kemudahan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi masa depan anak. Hal ini sebenarnya sesuatu yang bersifat paradoks karena alasan social keengganan keluarga muda di Jepang untuk memiliki anak adalah biaya hidup yang sangat tinggi terutama bidang kesehatan dan pendidikan, tuntutan kerja yang sangat tinggi, dan perubahan pola pikir seiring kemajuan yang dicapai oleh Jepang.

Kondisi berbeda dihadapi oleh Filipina, ketersediaan jumlah penduduk yang cukup besar, angka pengangguran yang tinggi, dan keterbatasan lapangan kerja menjadai masalah sosial dan ekonomi bagi negara dan warganya. Oleh karena itu, Pemerintah Filipina berupaya menangani bidang tenaga kerja secara serius dengan menyalurkan tenaga kerja yang tersedia ke negara-negara lain yang membutuhkan seperti Jepang. Penyaluran tenaga kerja ini bersamaan dengan upaya peningkatan pengetahuan dan keahlian tenaga kerja Filipina agar memenuhi syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh sector industry manufaktur dan jasa di

Jepang. Berdasarkan persyaratan tersebut maka Pemerintah Filipina menyiapkan pengetahuan dan keahlian calon tenaga kerja (*Overseas Filipino Workers*) melalui instansi terkait yang menangani ketenagakerjaan. Pemerintah Filipina memberikan tambahan pengetahuan para *OFW* akan hak dan kewajibannya (kesadaran hukum) sebagai pekerja sector formal dan informal, kemampuan bahasa asing terutama bahasa Inggris dan bahasa negara tujuan, serta meningkatkan keahlian melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan sebelum diberangkatkan. Hal tersebut merupakan nilai tambah para *OFW* dibandingkan para tenaga kerja asing dari negara lain termasuk Indonesia. *OFW* merupakan contributor devisa paling besar bagi Filipina dan 10% dari total tenaga kerja di Filipina adalah *OFW*.

Berdasarkan kondisi tersebut maka Jepang dan Filipina melakukan kerja sama bilateral dalam bidang tenaga kerja untuk mencapai kepentingan nasional negara masing-masing yaitu pembangunan social dan ekonomi. Kerja sama bilateral ini didasarkan atas beberapa pertimbangan dari kedua negara seperti: kedekatan letak geografis kedua negara, tingkat pengetahuan dan keahlian *OFW* yang sesuai dengan standar industry manufaktur dan jasa di Jepang, system atau manajemen pembagian kerja di Jepang yang sudah profesional dan tertata dengan baik, kepastian hukum yang mengatur hak dan kewajiban para majikan dan pekerja di Jepang.

Kerja sama bilateral antara Jepang dan Filipina tersebut masuk dalam kategori tingkat kolaborasi yaitu kerja sama yang ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, seperti mewujudkan kepentingan nasionalnya dalam bidang social dan ekonomi. Dalam hal ini, Jepang mampu memasok kebutuhan tenaga kerja dalam bidang industry manufaktur dan jasa sehingga mendongkrak kegiatan

ekonomi dalam negerinya. Dari sisi Filipina, pemerintah mampu mencari solusi alternatif pekerjaan yang layak bagi tenaga kerjanya sehingga meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Filipina (dampak sosial) dan menambah devisa negara dari sector tenaga kerja sebagai sumber dana pembangunan (dampak ekonomi). Angka pengangguran di Filipina cenderung menurun seiring konsistensi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri walaupun pertumbuhan jumlah penduduk terus meningkat.

Daftar Pustaka

Buku

- Gitosudarmo, Indriyo. (2003). *Pengantar Bisnis Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Kartasasmita, Koesnadi. (1998). *Organisasi dan Administrasi Internasional*. Bandung: PT Angkasa
- Ruch, William. A, Fearon and Witers. (1992). *Fundamental of Production and Operation Management*. United State of America: West Publishing Company. St. Paul.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. (2001). *Macroeconomics. Seventeenth Edition*. McGraw-Hill Higher Education.
- Soekanto, Soerjono. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali.
- Sukirno, Sadono. (2001). *Makro Ekonomi ed.2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro, Michael P. (2006). *Pembangunan Ekonomi. Jilid 1 edisi 9*. Jakarta: Erlangga.
- Toma, Peter A. Dan Gorman, Robert F. (1991). *International Relations: Understanding Global Issues*. California: Brooks/Cole Publishing Co.

Jurnal

- Semyonov, Moshe and Anastasia Gorodzeisky. (2008). *Labor Migration, Remittances and Economic well-being of Households in the Philippines. Popul Res Policy Rev (2008) 27: 619 – 637*.
- Veron, Jacques. (2008). *Prospects of Population Decline in Japan. Population and Societies October 2008; 449; Agricultural and Environmental Science Database*.
- Wiley, James E. (2012). *Exporting People: A Filipino Development Model. Focus on Geography. Spring 2012, 55; 1 ProQuest, page 19*.

Situs

- <https://buruhmigran.or.id/2010/09/27/soal-tki-belajar-dari-pengalaman-filipina/>
- http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/01/150102_majalah_jepang_kelahiran, diakses 10 Oktober 2016 pukul 14.25WIB
- <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/01/laju-penurunan-jumlah-penduduk-jepang-capai-rekor> diakses 10 Oktober 2016 pukul 15.25WIB

<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/16/tenaga-kerja-filipina-lebih-banyak-sumbang-devisa-dibanding-tki> diakses 12 Oktober 2016 pukul 13.25WIB

<http://www.bmj.com/cgi/content/full/320/7246/1362/h> JoeLamar. 2012. ShortageofNursesinJapanLeadstoHighAccidentRate.diakses 12 Oktober 2016 pukul 09.25WIB

[http://luthfiana12unairacid-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-58910-PIHI-ILMU%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL%20SEBUAH%20PENGANTAR%20\(%20Pengertian%20Hubungan%20Internasional,%20Essensi%20Interaksi%20Internasional,%20Power,%20Actors%20dan%20Interests\).html](http://luthfiana12unairacid-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-58910-PIHI-ILMU%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL%20SEBUAH%20PENGANTAR%20(%20Pengertian%20Hubungan%20Internasional,%20Essensi%20Interaksi%20Internasional,%20Power,%20Actors%20dan%20Interests).html)

<http://id.tradingeconomics.com/japan/gdp-growth-annual>

<http://id.tradingeconomics.com/japan/labor-force-participation-rate>

<https://id.tradingeconomics.com/philippines/remittances>

<http://www.imf.org/external/lang/indonesian/np/blog/2017/050417i.pdf>